

## Siaran Pers

### **KONFERENSI SANITASI DAN AIR MINUM NASIONAL 2017: OPTIMASI PENDANAAN UNTUK AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI 2019**

Jakarta, 7 November 2017 – Upaya penyediaan layanan sanitasi dan air minum layak bagi penduduk Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Kemajuan tersebut tidak lepas dari kerja bersama pelaku pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Untuk terus mempertahankan peningkatan pertumbuhan layanan dan kolaborasi antar pelaku pembangunan, Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Nasional (Pokja AMPL Nasional), Kementerian PPN/Bappenas dan mitra pembangunan di sektor air minum dan sanitasi kembali menyelenggarakan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN), yang diselenggarakan pada Selasa, 7 November 2017 di Hotel Le Meridien, Jakarta. Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) adalah ajang dua tahunan yang digagas Pokja AMPL Nasional untuk mendorong komitmen para pemangku kepentingan agar terus meningkatkan akses air minum dan sanitasi di Indonesia. Acara KSAN tahun ini bertema “Kerja Bersama Kejar Akses Universal” dan akan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, legislatif, LSM, donor, swasta dan media). Pembahasan yang akan dilaksanakan pada tahun ini akan difokuskan pada pembiayaan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dukungan seluruh pihak khususnya media diperlukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya pemenuhan akses universal untuk sanitasi dan air minum.

Setiap penyelenggaraan KSAN selalu menghasilkan kesepakatan dan melahirkan program kerja bersama. Antara lain, Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP), Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), dan NAWASIS (*National Water and Sanitation Information Services*). Kegiatan KSAN tahun ini difokuskan untuk membahas pemenuhan akses air minum dan sanitasi melalui peningkatan dan optimasi pembiayaan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah pembiayaan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan komitmen stakeholders pembangunan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam mencapai 100% akses sanitasi dan air minum di 2019 dan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Data Badan Pusat Statistik 2016, capaian akses air minum kini telah mencapai 71,14 persen dan akses sanitasi 76,37 persen (akses layak mencapai 67,2 persen dan akses dasar mencapai 9,17 persen). Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat komitmen dan dukungan pembangunan sektor air minum dan sanitasi dari pelaku sektor non-pemerintah, serta menyepakati langkah strategis untuk mewujudkan target air minum dan sanitasi nasional yang telah ditetapkan.

Acara ini dibuka oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, dan akan ditutup oleh Deputy Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata. Agenda acara dibagi dalam tiga topik utama terkait dengan pembiayaan untuk sektor air minum dan sanitasi di Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan prioritas pembangunan nasional. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemenuhan hak dasar bagi seluruh penduduk Indonesia. Tujuannya akhirnya adalah meningkatkan produktivitas Indonesia sebagai bangsa. "Air minum dan sanitasi sudah menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional karena air minum dan sanitasi membawa dampak yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta produktivitas bangsa Indonesia. Untuk itu, melalui KSAN ini kita butuh sinergi dan kolaborasi dalam segala aspek termasuk pembiayaan untuk mewujudkan target yang telah kita canangkan," ujar Menteri Bambang.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan penyediaan layanan air minum dan sanitasi turut berkontribusi pada penurunan masalah gizi buruk kronis (*stunting*). Saat ini masih ada 37,2 persen atau sekitar 9 juta anak di Indonesia mengalami *stunting*. Penanganan *stunting* tidak hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, namun juga melalui penyediaan air minum dan sanitasi yang aman dan layak. Penanggung Jawab KSAN 2017, Deputy Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata, menjelaskan KSAN tahun ini terfokus pada

pembiayaan sektor air minum dan sanitasi, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintah dan mitra lainnya. “Tema besar yang akan dibahas dalam KSAN 2017 akan difokuskan pada optimalisasi penggunaan dana transfer pemerintah seperti Dana Alokasi Khusus dan dana desa, dan mobilisasi sumber pendanaan alternatif seperti dana swasta melalui skema B2B (Business to Business), dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan mikro, dan dana ZISWAF untuk pembangunan sektor air minum dan sanitasi,” ujar Rudy.

KSAN 2017 juga akan menampilkan profil daerah (kab dan kota) yang telah memiliki akses air minum dan sanitasi yang baik di Indonesia untuk menjadi pembelajaran bagi kabupaten dan kota lainnya. Sesi Pertama, Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Sektor Air Minum dan Sanitasi. Sesi ini akan mengupas tuntas tentang efektivitas pemanfaatan DAK dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Sesi ini antara lain akan menghadirkan Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Bappenas, Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah (*champion* di sektor air minum dan sanitasi). Sesi Pemanfaatan dana desa sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk sektor air minum dan sanitasi akan menghadirkan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, dan Kepala Bappeda Kab/Kota dan Provinsi Champion. Dalam sesi ini akan dibahas strategi pengarusutamaan sektor air minum dan sanitasi melalui dana desa. Selanjutnya, sesi *creative financing* akan membahas mengenai implementasi pembiayaan pembangunan sektor air minum dan sanitasi melalui skema KPBU, CSR dan dana Lainnya. Sesi ini akan dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah, sektor swasta, koperasi dan lembaga filantropi. Untuk melengkapinya sebelumnya, strategi pencapaian agenda SDGs 2030 untuk target air minum dan sanitasi akan dibahas oleh perwakilan pemerintah dan swasta.

Sebagai acara utama akan dilaksanakan High Level Dialogue untuk membahas Dukungan Pendanaan dari APBD dan APBN dalam Rangka Mencapai Universal Access Air Minum dan Sanitasi. Sesi ini akan membahas hasil dari Sanitation and Water Forum dan penyusunan kesepakatan tindak lanjut oleh Pokja AMPL Nasional. Sesi ini akan dihadiri oleh perwakilan Eselon 1 dari Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kepala Daerah, dan mitra pembangunan. Hasil dari keseluruhan diskusi di KSAN 2017 akan menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan dan mitra pembangunan untuk mendorong komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat, khususnya dalam pembiayaan pembangunan air minum yang aman dan sanitasi yang layak untuk semua dalam rangka mencapai target Akses Universal 2019. \*\*\*

#### Tentang Pokja AMPL

Pokja AMPL Nasional beranggotakan Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pusat Statistik. Tugas pokok pokja AMPL adalah menyiapkan rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan AMPL serta membangun kemitraan dan berkoordinasi dengan mitra pembangunan di Indonesia.

Jakarta, 6 November 2017

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian PPN/Bappenas  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon: (021) 31936207, 3905650  
Faksimile: (021) 31901154  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)

Sekretariat Pokja AMPL Nasional ([www.ampl.or.id](http://www.ampl.or.id))  
Jl. Lembang No. 35 Menteng, Jakarta 10310  
Telp. (021) 31904113, Fax. (021) 31903909  
Email: [sekretariat.ksan2017@gmail.com](mailto:sekretariat.ksan2017@gmail.com)  
[ira.lubis@bappenas.go.id](mailto:ira.lubis@bappenas.go.id); [aldy.mardikanto@bappenas.go.id](mailto:aldy.mardikanto@bappenas.go.id)